

# Analisa Partisipasi Masyarakat Dalam Mekanisme Penyusunan Rancangan APB Desa Di Kabupaten Madiun

Henry Windarto Darmoko<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

## Abstract

*The purpose of this research is to analysis the compose the rural budget in Kabupaten Madiun and to know how to build the budget and to know the participation of public in process budgeting. Research Object at Desa Plumpungrejo and Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Type of analysis is qualitative with the Grounded Theory Method. The result of the research showed that in rural budgeting there are maximal participating public.*

**Keywords :** *Public Participation, rural budgeting*

## Pendahuluan

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya:

- a. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
- b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
- c. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;

- d. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- e. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Secara teknis masalah pengelolaan pembangunan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa desa harus menyusun RAPBDes yang dalam prosesnya terlebih dahulu menyusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Reencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Penyusunan RPJMDes dan RKP harus mengikutsertakan masyarakat melalui mekanisme pengkajian potensi dan masalah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip

pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. *Accountable*, Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. *Transparent*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
3. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
4. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana.

Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPT-Desa).

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian yang berupa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme Pemerintah Desa dalam membuat RAPBDesa ?
2. Apakah RPJMdes dan RKP telah disusun sesuai dengan

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 ?

3. Apakah RAPBdesa yang dibuat telah melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal ?
4. Apakah RAPB Desa yang disusun mencerminkan kebutuhan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat ?

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengkaji mekanisme penyusunan Rancangan APBDes yang meliputi RPJMDes dan RKP Desa
2. Mengkaji tingkat partisipasi (peran serta) masyarakat dalam penyusunan RPJMDes dan RKP Desa sehingga bisa menghasilkan RAPBDes yang berpihak pada masyarakat.

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)**

RPJM-Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan lima tahun. Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Maksud penyusunan RPJM-Desa adalah :

- a. Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka waktu lima tahun.
  - b. Merupakan masukan bagi penyusunan RPJM-Kecamatan.
  - c. Mengarahkan dan memudahkan desa dalam penyusunan RPTDesa
- Tujuan Penyusunan RPJM-Desa adalah :
- a. Adanya dokumen tertulis rencana pembangunan di desa.
  - b. Pemanfaatan sumber daya pembangunan.

c. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan secara bertahap.

**Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPT-Desa)**

Rencana Pembangunan Tahunan Desa adalah rencana desa yang dibuat untuk jangka waktu satu tahun dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM-Desa. RTP-Desa digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa, LPM dan BPD. Maksud penyusunan RPT-Desa adalah:

- a. Agar desa mempunyai rencana yang jelas dalam melaksanakan kegiatan
- b. Memudahkan pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Penyusunan RPT-Desa adalah :Adanya petunjuk tertulis tentang rincian pelaksanaan kegiatan.

- a. Pemanfaatan potensi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan desa.

b. Penerapan konsep pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bertahap.

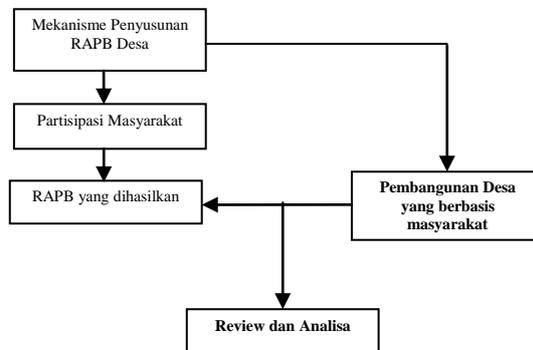
**Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan program pembangunan desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil Musrenbangdes dibahas dengan tim koordinasi kecamatan dalam forum Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, Bappeda dan Dinas teknis melakukan *review* usulan program/kegiatan kembali ke kecamatan dalam rangka *justifikasi* program/kegiatan.

**Kerangka Pemikiran Teoritis**

Kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :



**Metode Penelitian  
Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi, dan lebih menekankan pada kejadian yang sebenarnya (Indriantoro dan Supomo, 1999:219). Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana mekanisme dan keterlibatan masyarakat dalam menyusun RAPP Desa, penelitian ini

akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

**Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

**Jenis data Penelitian**

Data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian.

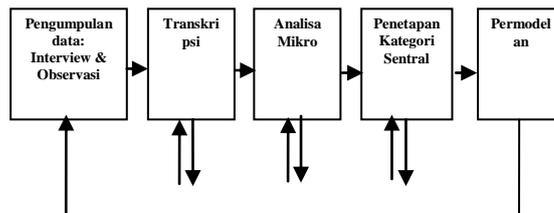
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan (*observation*) langsung.

### Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, yang merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman

mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999:12).

Analisis kualitatif yang dilakukan ditekankan pada *Grounded Theory Method* (Sujoko Efferin, 2008:4) :



## Hasil Dan Pembahasan

### Gambaran Umum Obyek Penelitian Karakteristik Wilayah Desa Plumpungrejo

Desa Plumpungrejo berada di wilayah kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, merupakan wilayah sebelah timur kabupaten Madiun, jarak menuju pusat pemerintahan Kabupaten Madiun jaraknya sekitar 21 km, menuju pusat kecamatan Wonoasri jaraknya sekitar 1 km.

Luas wilayah desa Plumpungrejo yaitu 230.705 ha, dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Bancong
- Sebelah Selatan : Desa Sidomulyo
- Sebelah Barat : Desa Wonoasri
- Sebelah Timur : Hutan

Peruntukan wilayah di desa plumpungrejo, yaitu:

- Pemukiman : 66.256 ha
- Pertanian/sawah : 155.219 ha
- Ladang/tegalan : 60.870 ha
- Bangunan Jalan : 4.800 ha
- Perkantoran : 800 ha
- Sekolahan : 1.900 ha
- Lapangan : 0,280 ha
- Kuburan : 500 ha

Kondisi tanah di wilayah Desa Plumpungrejo memiliki ketinggian rata-rata 63 meter, dengan tingkat kesuburan sebagai berikut :

- Wilayah Subur seluas 155.219 ha, yang sampai saat ini diperuntukkan atau difungsikan sebagai pertanian/sawah oleh warga desa Plumpungrejo yang memang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan termasuk desa agraris.
- Wilayah Sedang seluas 48.660 ha, yang digunakan untuk ladang/tegalan yang tidak digunakan untuk menanam padi.

### Karakteristik Penduduk

Jumlah penduduk desa plumpungrejo berdasarkan data sensus penduduk terakhir yaitu 4189 jiwa. Penggolongan jumlah penduduk desa Plumpungrejo berdasarkan jenis kelaminnya sebagai berikut :

- Laki-laki : 2005 Jiwa atau 47,81 % dari jumlah penduduk
  - Perempuan : 2189 Jiwa atau 52,19 % dari jumlah penduduk
- Penggolongan jumlah penduduk desa Plumpungrejo berdasarkan kelompok usia, adalah sebagai berikut :
- Umur 0 sd.14 tahun : 944 jiwa

- Umur 15 sd. 49 tahun: 2184 jiwa
  - Umur diatas 50 tahun : 429 jiwa
- Struktur mata pencaharian penduduk Desa Plumpungrejo mayoritas sebagai petani di desanya sendiri kurang lebih ada 60% - 65% sedangkan sisanya sebanyak 35% sampai 40% adalah sebagai pedagang (membuka warung), pengrajin, sopir, dan pegawai di sektor pemerintahan dan swasta.

Tingkat pendidikan atau sumber daya manusia di Desa Plumpungrejo bisa dikatakan baik, karena rata-rata sudah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun atau lulus SLTP, sebagian meneruskan sekolah di SLTA namun sebagian ada yang langsung bekerja atau membantu orang tua.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Plumpungrejo bisa dilihat dari data kemiskinan penduduk yaitu sebagai berikut :

- Penduduk Sangat Miskin : 81
- Penduduk Miskin : 338
- Penduduk hamper miskin : 199

### Kelembagaan

Pemerintah Desa Plumpungrejo Desa Plumpungrejo dipimpin oleh seorang kepala desa (lurah) yang dibantu oleh 5 orang staf kelurahan dan 4 orang kepala dusun, 1 modin dan 1 jogoboyo.

Kondisi saat ini Kepala Desa Plumpungrejo (Musolin) dinonaktifkan dan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari telah ditunjuk PLT kepala desa yaitu Suwondo (sebelumnya kaur pemerintahan).

- Jumlah Dusun dan RT  
Di Desa plumpungrejo terbagi menjadi 4 dusun, yaitu :
  - Dusun Plumpung Lor  
Kepala Dusun : Agus Asngari  
Jumlah RT 10 : RT. 01 sd. RT.10
  - Dusun Plumpung Kidul

Kepala Dusun : Suradi  
Jumlah RT 5 : RT. 11 sd. RT. 15

- Dusun Bangarum  
Kepala Dusun : Kosim  
Jumlah RT 7 : RT. 16 sd. RT.22
- Dusun Puser  
Kepala Dusun : Slamet  
Jumlah RT 5 : RT. 23 sd. RT. 27

b. Pelayanan Kesehatan  
Untuk pelayanan kesehatan pada masyarakatnya, di Desa Plumpungrejo sudah ada POLINDES yang tempatnya ada di sebelah kantor desa (balai desa Plumpungrejo) Pelayanan kesehatan dasar dan ibu hamil disediakan oleh polindes.

c. Lembaga Kemasyarakatan  
Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Plumpungrejo antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD), Kelompok Tani, Karang taruna, PKK, dan Takmir Masjid.

### Pembahasan

#### Kajian potensi dan masalah desa

Berdasarkan kajian potensi dan masalah yang telah dilakukan di tiap-tiap dusun di wilayah Desa Plumpungrejo, yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat dusun tersebut melalui musyawarah dusun, dapat disusun data potensi dan masalah desa, sebagai berikut:

#### a. Potensi Desa

Berdasarkan pemetaan Potensi di Desa Plumpungrejo di semua dusun dengan melibatkan partisipasi warga tiap-tiap dusun, berikut ini 10 potensi yang ada di Desa Plumpungrejo, sebagai berikut :

**Tabel 1. Potensi Desa Dan Pengembangannya**

No.	Uraian Potensi	Arah pengembangan
1	Tepian hutan banyak lahan yang masih kosong.	Direncanakan mau dipergunakan untuk tegalan /Idang, untuk budidaya rumput gajah untuk pakan ternak dan ditanami tanaman obat : jahe, temulawak, kunir, dsb.
2	Ada waduk Dawuhan di wilayah Plumpungrejo, yang luasnya mencapai 23 Ha.	Perlu memaksimalkan keberadaan waduk tersebut , misalnya dengan membuat Keramba ikan atau budidaya ikan.
3	Masyarakat selain bertani juga mempunyai ketrampilan beternak, sapi dan kambing.	Beternak sapi, kambing merupakan kegiatan tambahan untuk mendapatkan penghasilan lain selain dari pertanian. Ketrampilan ini masih belum dimaksimalkan di desa plumping karena masalah modal.
4	Sebagai penghasil pertanian lainnya selain padi, yaitu polowijo dan tanaman obat-obatan (jahe,kunir, temulawak dsb).	Untuk memberdayakan masih perlu lahan yang luas, karena selama ini tanaman selain padi ini ditanam di pekarangan rumah dan belum ditekuni secara serius.
5	Mempunyai Lapangan desa.	Lapangan desa Plumpungrejo masih belum di pergunakan dengan maksimal, rencananya di atas tanah lapangan tersebut selain untuk lapangan sepak bola juga akan di buat lapangan volley bal. dan kegiatan karang taruna (kepemudaan desa) saat ini lagi vakum.
6	Banyak Jerami padi yang belum di dayagunakan, terutama pada saat panen.	Direncanakan jerami ini bisa diproses lagi menjadi pupuk atau pakan ternak, dan untuk itu perlu tambahan ketrampilan pada petani.
7	Banyak masyarakat Desa Plumpungrejo yang berusaha sebagai pengusaha mikro, khususnya pedagang kecil yang berjualan keliling desa (Bakso, Mainan, sayuran , dsb).	Usaha mikro masyarakat perlu ditingkatkan atau dui berdayakan dan mereka rata-rata mengalami masalah permodalan untuk usaha.
8	Masih banyak waktu luang setelah bekerja di sawah yang perlu dimaksimalkan oleh para ibu-ibu (wanita).	Kedepan perlu adanya tambahan ketrampilan bagi ibu-ibu (wanita) agar bisa mempunyai usaha sampingan untuk memanfaatkan waktu luang di rumah guna mendapatkan tambahan penghasilan.
9	Memiliki potensi perikanan air tawar yang belum diagram dengan serius oleh masyarakat, karena kurang mampu memasarkan.	Perlunya ketrampilan bagi masyarakat dalam beternak ikan air tawar, saehingga ini bisa dikembangkan untuk menambah kegiatan dan penghasilan warga.

10	Adanya proyek P2T, Pompa air yang diandalkan untuk pengairan pada saat kemarau.	Perlunya pipanisasi guna menyalurkan air dari proyek P2T agar merata/ adil bagi petani desa.
----	---	--

#### b. Masalah Desa

Berdasarkan pemetaan masalah di tiap-tiap dusun yang dihimpun dari musyawarah di tiap-tiap dusun, maka dapat disusun permasalahan di Desa Plumpungrejo yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi warga tiap-tiap dusun, berikut ini 10 masalah yang sedang dihadapi Desa Plumpungrejo, sebagai berikut :

**Tabel 2. Masalah Desa Dan Solusinya**

NO	Permasalahan	Solusi kedepan
1	Banyak sarana-prasarana Fisik yang vital di desa yang sudah rusak, diantaranya : -Jalan -Jembatan - Drainase dan selokan Serta kebutuhan selokan/drainase di beberapa RT, karena belum adanya saluran tersebut.	Perlu segera diperbaiki sarana dan prasarana yang rusak karena bisa menyebabkan permasalahan lainnya misalnya banjir. Serta perlu segera dibangun selokan baru untuk daerah tertentu Untuk itu masalah sarana dan prasarana fisik masuk dalam program pembangunan yang utama di Desa Plumpungrejo.
	Kondisi Kantor desa sudah rusak serta alat kerja yang kurang memadai untuk memperlancar pelayanan dan administrasi.	Perlu renovasi gedung dan ruang di Kantor Desa Plumpungrejo, agar kantor lebih representative dan pelayanan masyarakat yang dipusatkan di Kantor desa bila dilayani dengan lebih baik, serta perlu penambahan perangkat Komputer baru + internet dan pelatihan pendukung bagi perangkatnya.
	Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat relatif rendah, karena banyak anak lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA sehingga kreativitas di desa Plumpungrejo rendah serta Tingkat pengangguran tinggi.	Perlu dicari terobosan agar anak-anak lulusan SLTP bisa melanjutkan SLTA. Perlu adanya diklat ketrampilan bagi para pengangguran di Desa Plumpungrejo sehingga bisa menciptakan kreativitas dan lapangan pekerjaan sendiri.
	Kurangnya suplay pupuk untuk produksi pertanian	Perlu diupayakan agar pasokan pupuk pertanian cukup untuk keperluan petani, dengan jalan menjalin kerjasama dengan pemasok pupuk atau KUD.
	Banyak masyarakat yang belum memiliki MCK sendiri (mengandalkan sungai yang melintasi desa)	Perlu segera dibangun MCK umum di beberapa wilayah yang dilintasi sungai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlu juga memberikan penyuluhan/penyadaran pada masyarakat akan pentingnya MCK sendiri, tanpa

		mengandalkan aliran sungai
	Banyak hasil usaha masyarakat non pertanian yang kesulitan dalam memasarkan. Selain itu hasil pertanian non padi, misalnya tanaman obat (jahe, kencur, dls) serta ketela juga masih sulit untuk dipasarkan.	Perlu untuk mencari pasar dengan melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta pihak swasta agar bisa menyalurkan hasil usaha tersebut.
	Rawan perkelahian, pencurian dan perjudian.	Perlu penyuluhan atau sosialisasi di bidang hukum dengan sasaran pemuda, dan pengangguran dengan melibatkan instansi kepolisian, dan perlu mengaktifkan kembali Siskamling.
	Kegiatan kepemudaan (karang taruna) tidak aktif meskipun banyak pemuda yang menganggur.	Perlu difasilitasi dalam membuat organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan dengan memaksimalkan fasilitas yang ada, misalnya : club olah raga, koperasi pemuda, atau membentuk unit usaha di karang taruna.
	Pada saat musim kemarau pasokan air bersih kurang, karena waduk kering.	Perlu dicari sumber air baru atau dengan melakukan pipanisasi dari proyek P2T agar suplay air merata.
	Pada saat musim penghujan sering terjadi banjir karena selokan yang kurang memadai bahkan ada wilayah yang belum ada selokannya serta hutan yang banyak ditebangi.	Perlu melakukan penghijauan/ reboisasi serta mempersiapkan saluran air yang lancar di desa Plumpungrejo.

### c. Visi Dan Misi Desa Plumpungrejo

#### 1) Visi Desa :

Visi Desa Plumpungrejo yang telah disepakati oleh masyarakat di desa plumpungrejo melalui musyawarah desa yaitu : "MEMBANGUN DESA PLUMPUNGREJO MENJADI DESA MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN."

#### 2) Misi Desa :

Misi desa Plumpungrejo yaitu :

- a) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan desa.

- b) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat menjadi masyarakat sejahtera dengan jalan merangsang warga untuk mempunyai usaha sampingan selain bertani, misalnya peternakan & perikanan atau usaha/industry lainnya sehingga mampu mendatangkan penghasilan tambahan.

- c) Membuka lapangan pekerjaan baru dengan cara memberikan

pendidikan dan pelatihan cara berwirausaha kepada masyarakat dan pemudanya sehingga muncul kreativitas dan keinginan untuk berusaha dan akhirnya pengangguran akan menurun.

- d) Meningkatkan kualitas prasarana secara social dasar dan ekonomi masyarakat, terutama Jalan, Jembatan, dan saluran air, sehingga fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian dan penjualan hasil pertanian menjadi lebih memadai, untuk itu perbaikan jalan, jembatan dan selokan menjadi prioritas utama.

Strategi pembangunan yang ditetapkan di desa Plumpungrejo berdasarkan musyawarah desa memprioritaskan bidang-bidang sesuai dengan urutannya berikut ini dengan melibatkan dan mengikutsertakan partisipasi dan swadaya masyarakat sesuai dengan kemampuannya,

Prioritas strategi pembangunan Desa Plumpungrejo adalah sebagai berikut:

- a. Bidang sarana dan prasarana

Bidang ini menjadi prioritas utama karena dinilai merupakan infrastruktur (pendukung) utama bagi desa Plumpungrejo yang masyarakatnya agraris. Kondisi fisik yang baik akan menunjang kelancaran transportasi dan roda perekonomian terutama dalam kegiatan angkut hasil panen pertanian, perdagangan, kerajinan, bahan material dan segala potensi sumber daya alam yang ada. Upaya Peningkatan taraf hidup masyarakat yang makmur dan sejahtera diprioritaskan pada pembangunan bidang Ekonomi, yaitu tersedianya Sarana/Prasarana Ekonomi untuk meningkatkan Kegiatan Pertanian, perdagangan, Kerajinan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

- b. Bidang Sosial Budaya

Bidang ini menjadi prioritas kedua karena pada dasarnya kondisi dan budaya serta kebiasaan-kebiasaan yang baik akan mendorong atmosfer untuk berusaha dan bekerja. Pelatihan berwirausaha non pertanian serta membentuk ambulan desa sebagai pelengkap fasilitas Polindes merupakan program dari bidang ini, dimana kedepan budaya berwirausaha masyarakat diharapkan mampu merangsang kreatifitas warga yang lain sehingga mampu menurunkan angka pengangguran, perkelahian serta pencurian.

- c. Bidang Ekonomi masyarakat

Bidang ini menjadi prioritas setelah infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung serta kondisi soSial budaya masyarakat yang baik, maka upaya atau langkah langkah menuju peningkatan ekonomi masyarakat akan lebih mudah. Prioritas pada program ini yaitu meningkatnya usaha sampingan/ tambahan dari petani karena sudah berfungsinya BUMDes serta semakin banyaknya petani yang mempunyai usaha peternakan atau perikanan yang nantinya juga mempunyai korelasi dari usaha utamanya yaitu pertanian, dimana jerami hasil panen dapat diolah sebagai makanan ternak dan sebaliknya kotoran ternak juga bisa diolah sebagai pupuk.

Rencana dari strategi tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa selama 5 (lima) tahunan, yang mana RPJM Desa yang telah ditetapkan di Desa Plumpungejo memiliki periode : 2009 sampai 2013.

Telah dilakukan Review atas RPJM Desa Plumpungrejo dan Rencana Kegiatan pembangunan (RKP) Desa Plumpungrejo dengan melibatkan masyarakat secara langsung dengan

melalui tahapan yang telah disepakati meliputi :

- 1) Pengkajian Potensi dan masalah di tingkat Dusun melalui Musyawarah Dusun.
- 2) Usulan program pembangunan dari masing masing dusun tersebut dibawa ke tingkat desa melalui Musdes untuk menyusun RPJM dan RKP Desa
- 3) Pembahasan usulan program pembangunan dari masing-masing dusun menjadi materi dalam melakukan REVIEW atas RPJM Desa dan menyusun RKP oleh Tim 11.
- 4) Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menganalisa secara bersama dan menyetujui hasil REVIEW atas RPJM Desa dan RKP.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat di tarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme Pemerintah Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam membuat RAPBDesa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.
2. Pemerintah Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 .
3. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah melibatkan masyarakat di tiap-tiap dusun melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk menggali potensi dan masalah di tiap

dusun dan selanjutnya disusun menjadi potensi dan masalah desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Daftar Pustaka

- Aang Abu Bakar Yusuf. 2007. *Relasi Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) dengan Perdamaian*.  
<http://www.CSRC.or.id>
- Britha Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Terjemahan, Yayasan Obor Indonesia.
- HAW. Widjaja. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lakpesdam Quarterly Narrative Report. 2006. *Participatory Budgeting And Expenditure Tracking (PBET)*. Yogyakarta.
- Lutfieka (2001). Brodjonegoro dan Asanuma (2000). Dalam Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau Dari Proses Dan Pengalokasian
- Marzuki Nyakman. 2001. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam buku Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan Suara Pembaruan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Desa Republik Indonesia. 2003. *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Permendagri No 13 Tahun 2006*

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2005. *PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.*
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2007. *Permendagri No. 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008*
- Republik Indonesia. 2007. *UU RI Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Nasional 2005 – 2025.*
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)*
- Susi Suhendra, dkk.. 2007. *Jurnal Pesat Vol. 2, ISSN 1858 - 2559: Kajian Prioritas Pembangunan Ekonomi Indonesia.*
- T. Sihol Nababan. 2005. *Kemiskinan di Indonesia: Kajian Teoritik, Penyebab dan Penanggulangannya.* Jurnal Visi, 12(1), 1-17
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Raja Grafindo Persada Jakarta.